

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kinerja instansi pemerintah saat ini banyak mendapat sorotan karena semakin mudahnya informasi dapat diakses masyarakat. Terutama terkait instansi pemerintah yang terlihat kurang peka terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien dan efektif karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Pratama, 2019). Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang jauh lebih baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggung jawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Pratama, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan good governance ialah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan lebih berdaya guna. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dari instansi pemerintah tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Bentuk dari pertanggungjawaban ini disusun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disampaikan dalam bentuk laporan yang dinamakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan disahkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi (Nengsy, Herda Karlina, 2020). Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil). Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator

masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang (LAKIP BKAD Kab.Cirebon).

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya (LAKIP BKAD Kab.Cirebon).

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik (LAKIP BKAD Kab.Cirebon).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada suatu instansi. Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan (Putri, 2019).

Tabel 1.1
 Nilai Rata-Rata Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Cirebon
 Tahun 2018 – 2022

| Tahun | Capaian Kinerja | Capaian Anggaran |
|-------|-----------------|------------------|
| 2018 | 105,57% | 91,36% |
| 2019 | 105,86% | 90,65% |
| 2020 | 95,50% | 87,59% |
| 2021 | 96,20% | 90,79% |
| 2022 | 98,60% | 95,26% |

(Sumber : LAKIP BKAD Kab. Cirebon)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya capaian kinerja yang dibuat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon tahun

2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa besarnya capaian anggaran dengan rata-rata sebesar 87,59% dan capaian kinerja dengan rata-rata 95,50%.

Adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 tersebut disebabkan karena ada indikator kinerja utama (IKU) yang tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target. Pada indikator Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi (Non Kumulatif) dengan target kinerja 59,71% namun hanya terealisasi 52,63%. Hal ini disebabkan karena sebesar 59,71% atau 125 ajuan tanah yang akan disertifikatkan ditambah 616 yang sudah bersertifikat. Tahun 2020 Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah didaftarkan dan lengkap berkasnya ke BPN sebanyak 97 bidang Sehingga capaiannya sebesar 52,63% atau dari 1339 bidang yang baru bersertikat sebanyak 713 (616 bidang + 97 bidang). Sehingga capaiannya tidak tercapai 100,00%, hal ini dikarenakan Dokumen kepemilikan awal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang/tidak lengkap untuk proses pensertifikatan tanah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) indikator kinerja, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang tidak berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada rencana strategis dikategorikan didapat 95,50%

Dengan mengetahui perbandingan hasil capaian kinerja dan capaian anggaran, maka tingkat efektivitas pengukuran kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 1.2

Predikat Nilai Capaian Kinerja

| Target | Predikat |
|-------------|----------------|
| 100 Keatas | Tercapai |
| Dibawah 100 | Tidak Tercapai |

Sumber : (LAKIP BKAD Kab. Cirebon)

Tabel 1.3

Predikat Nilai Capaian Kinerja

| Target | Kriteria |
|-------------|-----------------|
| 85 s/d 100 | Sangat Berhasil |
| 70 s/d < 85 | Berhasil |
| 55 s/d < 70 | Cukup Berhasil |
| 0 s/d < 55 | Kurang Berhasil |

Sumber : (LAKIP BKAD Kab. Cirebon)

Peningkatan tata kelola di sektor pemerintahan merupakan hal yang penting pada era reformasi birokrasi saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Reformasi Birokrasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan tercapainya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (2018) melakukan Penelitian mengenai “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan” menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Mujannah, Safriansyah, Iqbal Firdausi dan Siti Fatimah (2022) yang berjudul “Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah” menyatakan bahwa variabel implementasi SAP berbasis akrual berpengaruh, dan sumber daya manusia, manajemen risiko, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap AKIP. Variabel komitmen organisasi, teknologi informasi, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap AKIP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dalam capaian kinerja pada tahun 2020.
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon harus meningkatkan penyajian Penerapan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan yang terbuka untuk publik dikarenakan adanya penurunan evaluasi kinerja yang akan berdampak menurunnya kepercayaan publik.
- c. Belum maksimalnya kualitas pelayanan, kinerja tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
- d. Belum maksimalnya kinerja evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Cirebon ?

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon ?
3. Apakah penerapan Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten .
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Cirebon.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi penulis

Merupakan pembelajaran dalam menganalisis akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Cirebon serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan pengendalian internal.

2. Bagi akademisi

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana

untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi BKAD Kabupaten Cirebon

Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan mengenai penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja di BKAD Kabupaten Cirebon.

4. Bagi pihak lain

Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai informasi yang berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang berpengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Cirebon dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoretik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dengan menganalisis landasan teori yang dipergunakan, memetakan hasil penelitian terdahulu yang relevan, membuat kerangka teoritis, dan menyusun hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas tentang isi dan analisis mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan ialah pernyataan-pernyataan sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan atau pernyataan penelitian dan bukan rangkuman atau ikhtisar. Sedangkan saran yaitu rekomendasi yang urgen dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

